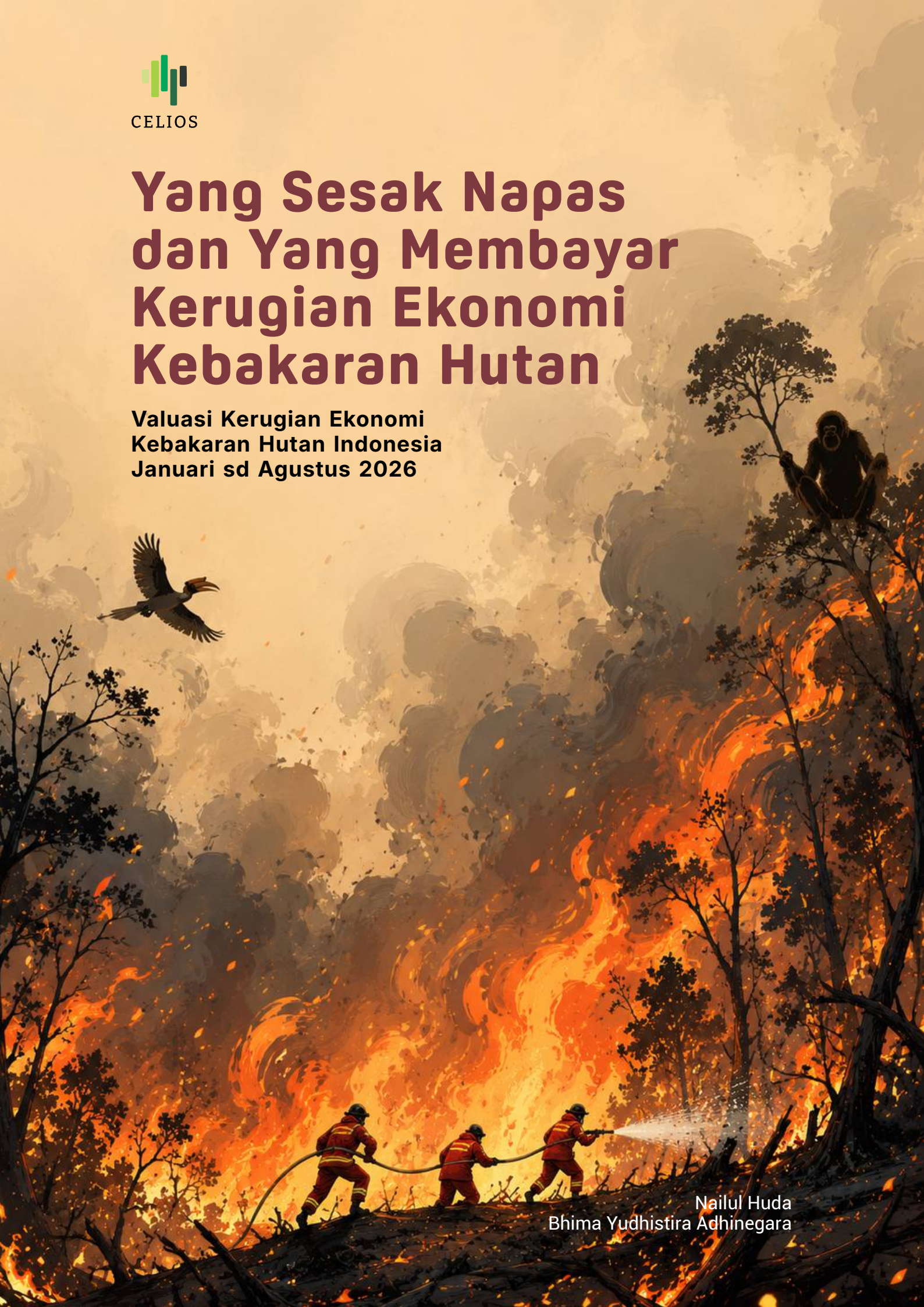


Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan

Valuasi Kerugian Ekonomi
Kebakaran Hutan Indonesia
Januari sd Agustus 2026



Nailul Huda
Bhima Yudhistira Adhinegara

Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan

Valuasi Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan Indonesia
Januari sd Agustus 2026

oleh: Nailul Huda; Bhima Yudhistira Adhinegara

TEMUAN UTAMA

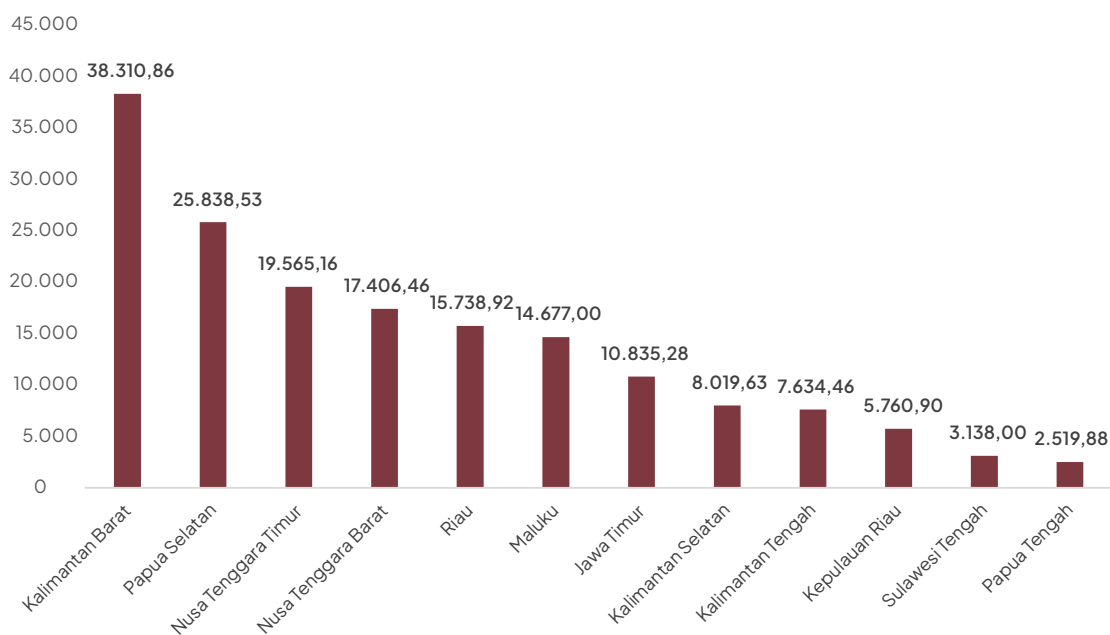
-  Total Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026, berpotensi mencapai Rp39,29–123,1 triliun. Kerugian ekonomi Rp123,1 triliun setara 49,1% proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Tengah 2026. Angka ini perlu dicatat belum menghitung skenario meluasnya Karhutla hingga akhir 2026.
-  Total Biaya Ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp29,54 triliun dan menghilangkan potensi penerimaan pajak daerah mencapai Rp269,86 miliar.
-  Total Biaya Kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp9,75 triliun yang berasal dari biaya kesehatan langsung dan biaya kesehatan tidak langsung dari Karhutla.
-  Total Biaya Kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis dan bergejala dari efek Karhutla mencapai Rp93,56 triliun. Biaya ini setara 67,6% total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026. Beban juga akan ditanggung oleh lonjakan klaim BPJS Kesehatan dan mengurangi daya beli masyarakat yang menjadi korban Karhutla.
-  Mendesak Pemerintah segera melakukan 4 kebijakan: penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026; Segera bangun tempat pengungsian yang aman, melakukan evakuasi medis bagi kelompok rentan; evaluasi seluruh izin usaha perkebunan sawit dan pertambangan; bentuk tim pemulihan ekosistem terpadu.

1 Biaya Ekonomi

Kebakaran hutan bukan semata karena anomali cuaca Super El-Nino, tapi ulah korporasi dan manusia. Sepanjang Januari–Juni 2026, data Gakkum Kemenhut mencatat kenaikan 366% kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibanding tahun 2025. Hingga Agustus 2026, Kalimantan Barat mendominasi dengan 38.310,86 ha, hampir 1,5 kali lipat dari provinsi kedua (Papua Selatan, 25.838,53 ha) dan lebih dari 15 kali lipat provinsi terbawah (Papua Tengah, 2.519,88 ha).

Terdapat fakta dari data resmi bahwa sebaran 12 provinsi ini tidak lagi terkonsentrasi di sabuk gambut Sumatra–Kalimantan seperti krisis Karhutla 2015 atau 2019. Lonjakan kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan tercatat menduduki no.2 sebesar 25.838,5 ha. Pergeseran konsentrasi Karhutla sejalan indikasi adanya pembukaan lahan masif untuk proyek terkait *food estate* dan *bioethanol* di Papua Selatan. Anomali cuaca El-Nino atau kekeringan panjang adalah pra-kondisi, namun rentannya lahan gambut karena industri ekstraktif jadi pemicu utama.

Data Luasan Hutan dan Lahan yang Terbakar per Agustus 2026 (dalam Hektar)



Sumber: SIPONGI KLHK per Agustus 2026

Selain hilangnya luasan hutan, terdapat kerugian ekonomi dan biaya kesehatan yang ikut terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kerugian ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Kiely dkk (2021) yang menyebutkan ada kerugian ekonomi dan biaya restorasi dari kebakaran hutan dan lahan. Ada dua kajian lainnya yang menyebutkan kerugian ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kajian World Bank (2015) menyebutkan kerugian dari kebakaran mencapai Rp85 juta per Ha, sedangkan di tahun 2019 World Bank menyebutkan kerugian ekonomi sebesar Rp45 juta per Ha. Sedangkan Keily dkk menyebutkan ada kerugian hingga Rp147 juta per Ha akibat kerugian ekonomi dan juga restorasi lahan.

Tabel 1

Estimasi Kerugian per Ha Hutan dan Lahan yang Terbakar

	Luas Lahan Terdampak	Kerugian (Rp Triliun)	Kerugian (Rp)/Ha	Sumber
Kerugian Tahun 2015	2.600.000	221	85.000.000	World Bank, The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis (Feb 2016) — https://hdl.handle.net/10986/23840
Kerugian Tahun 2015	2.600.000	384,4	147.846.153	Keily, dkk (2021) "Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland", Nature Communications. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27353-x
Kerugian Tahun 2019	1.649.258	75	45.474.995	https://www.aljazeera.com/economy/2019/12/11/forest-fires-cost-indonesia-5-2bn-and-counting-world-bank

Dengan data tersebut kajian ini mengolah dampak kerugian ekonomi dan restorasi lahan seperti yang dilakukan oleh Keily dkk (2021). Dari data yang diolah, ada potensi kerugian ekonomi yang hilang mencapai Rp29,54 triliun atau 0,23 persen dari PDB. Kerugian ekonomi ini didapat bukan hanya dari aset yang terbakar, namun aktivitas ekonomi yang terhenti akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pertanian, dan komoditas makanan minuman ikut mengalami kontraksi, tidak hanya kerugian dari sektor kehutanan.

Dari sisi wilayah, Kalimantan Barat mendapatkan dampak negatif paling besar yaitu Rp5,7 triliun, diikuti Papua Barat (Rp 4,3 triliun), dan juga Nusa Tenggara Timur (Rp2,8T). Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luas terbakar terbesar (38.310,86 ha) juga menempati dampak ekonomi terbesar, memperkuat linearitas hubungan luas-kerugian di provinsi ini. Provinsi Papua Barat dan NTT juga menandai bahwa karhutla ini bukan hanya didominasi oleh wilayah Kalimantan dan Sumatera, namun juga sudah merambat ke Indonesia Timur.

Tabel 2 Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan terhadap PDRB dan PDB Nasional
(dalam Juta Rp)

	Dampak PDRB/PDB	PDRB/PDB Awal	Perubahan
Aceh	(11.144,07)	134.554.529,48	(0,0083)
Sumatera Utara	(96.027,70)	558.988.617,04	(0,0172)
Sumatera Barat	(55.084,01)	184.944.922,09	(0,0298)
Riau	(2.590.351,95)	563.928.861,62	(0,4593)
Jambi	(53.262,54)	149.374.847,77	(0,0357)
Sumatera Selatan	(218.214,67)	394.422.627,28	(0,0553)
Bengkulu	(7.746,58)	54.691.894,11	(0,0142)
Lampung	(33.544,64)	262.618.748,08	(0,0128)
Kep. Bangka Belitung	(12.007,73)	65.441.766,29	(0,0183)
Kep. Riau	(806.651,96)	202.726.215,40	(0,3979)
DKI Jakarta	(1.005.602,73)	2.150.040.705,76	(0,0468)
Jawa Barat	(316.093,26)	1.869.555.173,20	(0,0169)
Jawa Tengah	(445.974,22)	1.048.914.781,97	(0,0425)
DI Yogyakarta	(29.935,67)	120.302.495,06	(0,0249)
Jawa Timur	(2.344.189,30)	1.884.107.401,35	(0,1244)
Banten	(132.175,11)	603.234.778,01	(0,0219)
Bali	(31.407,83)	192.826.509,59	(0,0163)
Nusa Tenggara Barat	(2.635.321,13)	121.305.889,08	(2,1725)
Nusa Tenggara Timur	(2.744.941,59)	86.629.826,33	(3,1686)
Kalimantan Barat	(5.774.784,19)	131.101.211,39	(4,4048)
Kalimantan Tengah	(1.171.801,43)	116.380.355,80	(1,0069)
Kalimantan Selatan	(1.240.907,31)	163.271.133,24	(0,7600)
Kalimantan Timur	(271.294,71)	492.033.198,86	(0,0551)
Kalimantan Utara	(17.218,20)	64.126.671,80	(0,0269)
Sulawesi Utara	(29.419,60)	109.263.093,63	(0,0269)
Sulawesi Tengah	(555.567,37)	114.018.656,44	(0,4873)
Sulawesi Selatan	(182.264,15)	374.016.598,19	(0,0487)
Sulawesi Tenggara	(47.512,32)	87.518.082,17	(0,0543)
Gorontalo	(2.106,22)	29.894.860,32	(0,0070)
Sulawesi Barat	(4.205,21)	32.596.657,85	(0,0129)
Maluku	(2.245.865,79)	44.340.821,48	(5,0650)
Maluku Utara	(35.661,60)	32.831.893,33	(0,1086)
Papua Barat	(4.367.900,51)	67.862.465,15	(6,4364)
Papua	(24.108,73)	146.364.079,46	(0,0165)
Total	(29.540.294,03)	12.654.230.368,62	(0,2334)

*angka di dalam kurung (...) artinya minus

Sumber: Tim CELIOS, 2026

Selain mengikis perekonomian, penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi tersebut juga semakin menipis. Secara total, ada Rp269,9 miliar penerimaan pajak bersih di daerah yang hilang (*potential loss*) dari adanya kebakaran hutan dan lahan. Pajak bersih didefinisikan sebagai total pajak setelah dikurangi subsidi. Pengurangan penerimaan pajak bersih ini berasal dari rendahnya aktivitas ekonomi dan juga dana terpakai untuk keperluan yang seharusnya bisa dihindari. Salah satunya upaya pemadaman api di titik hutan dan lahan yang terbakar yang membutuhkan biaya cukup besar.

Dari sisi daerah, Kalimantan Barat kehilangan potensi pajak bersih sebesar Rp28 miliar dan Jawa Timur sebesar Rp93 miliar. Sedangkan DKI Jakarta juga kehilangan potensi pajak bersih sebesar Rp67 triliun. Kehilangan ini berdasarkan pada aktivitas yang berhubungan dengan produksi kehutanan yang hilang sehingga sektor turunan di provinsi lainnya juga terdampak (industri olahan kayu, pulp and paper, furnitur dll). Oleh karena itu, DKI Jakarta dan Jawa Timur mendapatkan dampak negatif terhadap potensi penerimaan daerah yang cukup besar.

Tabel 3 Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan terhadap Pajak Daerah
(dalam Juta Rp)

	Dampak Pajak Bersih	Pajak Bersih Awal	Perubahan
Aceh	4,12	267.295,43	0,0015
Sumatera Utara	(1.244,24)	12.111.200,15	(0,0103)
Sumatera Barat	(1.196,47)	5.199.791,00	(0,0230)
Riau	(8.564,15)	5.229.476,15	(0,1638)
Jambi	(571,12)	2.354.259,27	(0,0243)
Sumatera Selatan	(418,79)	2.168.752,88	(0,0193)
Bengkulu	85,64	(425.360,20)	(0,0201)
Lampung	(209,18)	2.701.453,34	(0,0077)
Kep. Bangka Belitung	(611,42)	2.365.976,19	(0,0258)
Kep. Riau	(2.960,53)	931.964,46	(0,3177)
DKI Jakarta	(67.426,78)	143.870.516,03	(0,0469)
Jawa Barat	(16.241,45)	118.756.953,55	(0,0137)
Jawa Tengah	(1.996,61)	25.244.793,88	(0,0079)
DI Yogyakarta	(870,30)	4.067.343,46	(0,0214)
Jawa Timur	(93.770,74)	174.845.954,88	(0,0536)
Banten	222,34	11.820.817,50	0,0019
Bali	(147,83)	1.203.914,08	(0,0123)
Nusa Tenggara Barat	(209,25)	2.065.943,96	(0,0101)
Nusa Tenggara Timur	(12.405,00)	1.215.859,01	(1,0203)
Kalimantan Barat	(28.896,56)	2.696.823,53	(1,0715)
Kalimantan Tengah	(4.969,70)	1.349.126,44	(0,3684)
Kalimantan Selatan	(6.308,26)	1.322.956,68	(0,4768)
Kalimantan Timur	(9.349,20)	27.530.819,06	(0,0340)
Kalimantan Utara	(510,72)	2.025.661,65	(0,0252)
Sulawesi Utara	(544,56)	4.267.122,12	(0,0128)
Sulawesi Tengah	(3.632,02)	605.677,03	(0,5997)
Sulawesi Selatan	(3.866,62)	8.028.100,04	(0,0482)
Sulawesi Tenggara	(241,97)	2.442.003,63	(0,0099)
Gorontalo	3,92	466.810,11	0,0008
Sulawesi Barat	(226,32)	1.951.742,48	(0,0116)
Maluku	(14.800,56)	316.677,88	(4,6737)
Maluku Utara	(879,64)	285.550,65	(0,3081)
Papua Barat	13.031,40	(1.239.483,52)	(1,0514)
Papua	(138,26)	703.101,14	(0,0197)
Total	(269.860,87)	568.749.593,92	(0,0474)

*angka di dalam kurung (...) artinya minus

Sumber: Tim CELIOS, 2026

2 Biaya Kesehatan

Selain dampak kepada ekonomi secara provinsi dan nasional, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan adanya lonjakan biaya kesehatan. Di balik setiap gangguan pernapasan karena asap yang dialami warga terdampak, tersimpan dua lapis biaya yang jarang tampak dalam berbagai analisa pemerintah, namun menentukan seberapa besar sesungguhnya hargayang dibayar Indonesia setiap kali karhutla melanda.

Dalam penelitian Ahmed dkk (2015), menyebutkan ada dua biaya sebagai biaya dari kesehatan akibat sebuah fenomena tertentu. Pertama adalah biaya medis atau biaya langsung berupa rawat inap, konsultasi dokter, dan obat. Kedua adalah biaya non-medis atau tidak langsung berupa hilangnya pendapatan dari pasien dan pendamping akibat tidak mampu menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif. Masing-masing dari biaya kemudian dijumlahkan membentuk biaya total dari kesehatan akibat adanya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam menghitung biaya langsung atau biaya medis, kajian ini menggunakan data yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Kementerian Kesehatan. Ada dua skenario yang dipaparkan dalam menghitung prevelensi dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu dengan menggunakan diagnosis ISPA dan juga diagnosis plus gejala ISPA.

A Diagnosis ISPA

Diagnosis ISPA dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka oleh Kementerian Kesehatan, diagnosis ISPA adalah kondisi dimana 1 bulan terakhir masyarakat didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Artinya, masyarakat yang berpotensi dalam pembahasan ini merupakan masyarakat yang sudah dan berpotensi akan didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan. Secara nasional, angkanya bisa rendah karena tidak semua masyarakat akan memeriksakan kondisinya, tapi menunjukkan gejala ISPA. Maka ada diagnosis+gejala ISPA dalam pembahasan selanjutnya.

Data dari BPJS menjelaskan bahwa pravelensi penyakit ISPA secara nasional di angka 2,2 persen yang sudah terdiagnosis. Dengan rentang dari 0,8 persen hingga 18,8 persen di daerah yang terkena kebakaran hutan dan lahan. Dari Kementerian Kesehatan juga mencatat ada kenaikan hingga 78 persen untuk angka prevelensi akibat kebakaran hutan dan lahan tahun ini¹. Dengan menggunakan asumsi tersebut, ada potensi 1,78 juta orang yang terdiagnosis ISPA.

1 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8630770/kemenkes-lebih-dari-3-juta-warga-ri-kena-asap-karhutla-kasus-ispa-melonjak-78-persen>

Tabel 4 Potensi Masyarakat Terdiagnosis ISPA

	Populasi	Diagnosis		Jumlah
		Prevalensi ISPA 2023	Prevalensi ISPA 2026 (Potensi)	
Kalimantan Barat	5.750.000	1,10%	1,10%	112.585
Papua Selatan	562.220	3,60%	3,60%	36.027
Nusa Tenggara Timur	5.600.000	1,00%	1,00%	99.680
Nusa Tenggara Barat	5.666.314	3,10%	3,10%	312.667
Riau	7.490.000	0,80%	0,80%	106.658
Maluku	1.870.000	1,00%	1,00%	33.286
Jawa Timur ²	6.632.162	3,20%	3,20%	377.768
Kalimantan Selatan	4.150.000	1,10%	1,10%	81.257
Kalimantan Tengah	2.700.000	0,70%	0,70%	33.642
Kepulauan Riau	2.140.000	1,00%	1,00%	38.092
Sulawesi Tengah	3.100.000	0,90%	0,90%	49.662
Papua Tengah	1.492.290	18,80%	18,80%	499.380
Total	47.152.986			1.780.704

Sumber: Tim CELIOS, 2026

Data BPJS Kesehatan menunjukkan skala bebannya dimana sepanjang 2023, tercatat 3,5 juta kasus ISPA di tingkat Puskesmas/klinik. Sementara di tingkat rumah sakit tercatat 1,1 juta kasus rawat jalan penyakit pernapasan dengan total biaya Rp431 miliar (rata-rata sebesar Rp392.000/kasus), dan 1,7 juta kasus rawat inap dengan total biaya Rp13,3 triliun (rata-rata Rp7,82 juta/kasus)³. Dari sisi orang yang telah dan berpotensi terdiagnosis mencapai 1,78 juta orang dan mengakibatkan total biaya kesehatan mencapai Rp9,75 triliun. Biaya kesehatan langsung seperti rawat inap dan rawat jalan mencapai Rp7,13 triliun dan biaya kesehatan tidak langsung mencapai Rp2,63 triliun.

Jawa Timur, meskipun secara historis cukup sedikit untuk kasus kebakaran hutan dan lahan, namun karena jumlah penduduk yang padat, bisa mengakibatkan total biaya kesehatan yang dibayarkan oleh masyarakat mencapai Rp1,92 triliun, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Riau. Kebakaran lahan di Jawa Timur bisa menyebar di beberapa titik kawasan taman nasional. Dalam beberapa laporan media massa, kasus kebakaran lahan di Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan.

2 *Jawa Timur hanya terdiri dari Kabupaten dalam Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru:

1. Kab Probolinggo
2. Kab Pasuruan
3. Kab Lumajang
4. Kab Malang

3 <https://www.antaraneews.com/berita/4199064/penyakit-akibat-polusi-udara-bebani-bpjs-kesehatan-hingga-rp13-triliun>

Tabel 5 Total Biaya Kesehatan Masyarakat Terdiagnosis ISPA

	Diagnosis ISPA			
	Potensi ISPA (Orang)	Biaya Kesehatan Langsung (Rp T)	Biaya Kesehatan Tidak Langsung (Rp T)	Total Biaya Kesehatan (Rp T)
Kalimantan Barat	112.585	0,45	0,15	0,6
Papua Selatan	36.027	0,14	0,07	0,22
Nusa Tenggara Timur	99.680	0,4	0,11	0,51
Nusa Tenggara Barat	312.667	1,25	0,37	1,62
Riau	106.658	0,43	0,18	0,61
Maluku	33.286	0,13	0,05	0,18
Jawa Timur*	377.768	1,51	0,41	1,92
Kalimantan Selatan	81.257	0,33	0,13	0,46
Kalimantan Tengah	33.642	0,13	0,06	0,19
Kepulauan Riau	38.092	0,15	0,07	0,22
Sulawesi Tengah	49.662	0,2	0,07	0,27
Papua Tengah	499.380	2	0,95	2,95
Total	1.780.704	7,13	2,63	9,75

Sumber: Tim CELIOS, 2026

B Diagnosis plus Gejala ISPA

Selain orang yang terdiagnosis ISPA, ada sebagian besar masyarakat yang mengalami gejala namun tidak mendapatkan diagnosis. Mereka yang mengalami gejala ISPA seperti demam, batuk, hidung tersumbat, hingga sakit tenggorokan, akan dikategorikan sebagai gejala ISPA. Angka untuk gejala ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan diagnosis karena masyarakat enggan melakukan pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan, baik karena alasan jauh dari fasilitas kesehatan ataupun karena pertimbangan biaya. Dalam laporan ini, mereka yang mengalami gejala merupakan kelompok masyarakat yang terdampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan ada masyarakat juga yang tidak terdiagnosis namun menunjukkan gejala ISPA. Data dari BPS menyebutkan untuk ada 23,5 persen masyarakat yang terdiagnosis dan bergejala ISPA. Dengan menggunakan kenaikan yang sama (78 persen), ada potensi jumlah masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan yang menderita gejala dan diagnosis ISPA mencapai 17,4 juta jiwa. Provinsi NTB menjadi provinsi dengan potensi ISPA tertinggi karena prevalensi ISPA yang tinggi di tahun 2023.

Tabel 6 Potensi Masyarakat Terdampak dari Diagnosis dan Gejala ISPA

	Diagnosis plus Gejala			Jumlah
	Populasi	Prevalensi ISPA 2023	Prevalensi ISPA 2026 (Potensi)	
Kalimantan Barat	5.750.000	15%	27%	1.576.150
Papua Selatan	562.220	28%	49%	277.208
Nusa Tenggara Timur	5.600.000	18%	33%	1.864.016
Nusa Tenggara Barat	5.666.314	36%	64%	3.661.232
Riau	7.490.000	14%	24%	1.813.179
Maluku	1.870.000	14%	26%	475.990
Jawa Timur*	6.632.162	23%	40%	2.679.791
Kalimantan Selatan	4.150.000	20%	35%	1.440.465
Kalimantan Tengah	2.700.000	17%	30%	802.602
Kepulauan Riau	2.140.000	11%	20%	434.249
Sulawesi Tengah	3.100.000	23%	42%	1.291.212
Papua Tengah	1.492.290	39%	70%	1.046.573
Total	47.152.986			17.362.707

Sumber: Tim CELIOS, 2026

Dengan menggunakan asumsi yang sama dengan diagnosis, maka biaya kesehatan masyarakat yang terdampak dengan gejala ISPA mencapai Rp93,56 triliun. Biaya kesehatan tersebut terdiri dari biaya kesehatan langsung sebesar Rp69,48 T dan biaya kesehatan tidak langsung mencapai Rp24,08 T. Provinsi Jawa Timur, NTB, dan Riau menjadi tiga provinsi yang mempunyai dampak paling terdampak secara biaya kesehatan.

Pemerintah daerah di tiga provinsi yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau perlu mewaspada dampak biaya kesehatan ini meskipun secara luasan lahan tidak setinggi Kalimantan Barat. Namun, karena kepadatan penduduk, maka dampak biaya kesehatan bisa lebih tinggi. Dengan predikat sebagai salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mulai waspada terhadap titik-titik kebakaran lahan.

Tabel 7 Total Biaya Kesehatan Masyarakat Terdampak dari Diagnosis dan Gejala ISPA

	Diagnosis ISPA			
	Potensi Terdampak (Orang)	Biaya Kesehatan Langsung (Rp T)	Biaya Kesehatan Tidak Langsung (Rp T)	Total Biaya Kesehatan (Rp T)
Kalimantan Barat	1.576.190	6,31	2,15	8,45
Papua Selatan	277.208	1,11	0,56	1,67
Nusa Tenggara Timur	1.864.016	7,46	2,04	9,5
Nusa Tenggara Barat	3.661.232	14,65	4,36	19,01
Riau	1.813.179	7,26	3,06	10,31
Maluku	475.990	1,9	0,71	2,61
Jawa Timur*	2.679.791	10,72	2,92	13,65
Kalimantan Selatan	1.440.465	5,76	2,39	8,16
Kalimantan Tengah	802.602	3,21	1,32	4,53
Kepulauan Riau	434.249	1,74	0,75	2,49
Sulawesi Tengah	1.291.212	5,17	1,83	7
Papua Tengah	1.046.573	4,19	2	6,19
Total	17.362.707	69,48	24,08	93,56

Sumber: Tim CELIOS, 2026

Tabel 8

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2022–2027
(miliar rupiah)

Kode	Fungsi	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	LKPP 2025	Outlook 2026	RAPBN 2027
1	PELAYANAN UMUM	909.580	809.701	895.534	806.261	802.773	845.759
2	PERTAHANAN	150.276	171.480	190.271	348.580	299.141	329.472
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	171.798	193.328	230.128	238.687	259.193	259.268
4	EKONOMI	443.654	485.426	546.197	486.176	943.548	958.406
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	12.805	13.512	14.536	8.202	12.705	15.691
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	25.071	38.073	48.104	20.427	26.207	29.791
7	KESEHATAN	124.469	98.406	99.345	107.168	138.426	139.066
8	PARIWISATA	4.139	4.539	3.899	2.731	2.449	4.623
9	AGAMA	10.392	11.012	12.738	14.263	13.732	14.683
10	PENDIDIKAN	160.139	171.955	197.180	262.326	472.916	482.425
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	267.699	242.348	258.287	291.593	274.383	283.003
	Jumlah	2.280.027	2.239.786	2.496.223	2.586.420	3.245.479	3.362.192

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 9

**Perbandingan Kerugian Karhutla Januari–Agustus 2026 terhadap PNBP
(miliar rupiah)**

Uraian	Outlook 2026	RAPBN 2027	Persentase kerugian Karhutla Rp123,1T / PNBP 2026	Terhadap PNBP 2027
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak *	575.140,4	517.410,7	21%	24%
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	280.041,5	283.415,9	44%	43%
1) Pendapatan SDA Migas	138.131,8	129.943,0	89%	95%
a) Pendapatan Minyak Bumi	98.942,3	90.036,9	124%	137%
b) Pendapatan Gas Bumi	33.156,0	34.816,8	371%	354%
c) Pendapatan Minyak dan Gas Bumi Lainnya	6.033,5	5.089,3	2.040%	2.419%
2) Pendapatan SDA Nonmigas	141.909,7	153.472,9	87%	80%
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	130.856,1	142.042,7	94%	87%
b) Pendapatan Kehutanan	6.616,8	6.393,2	1.860%	1.925%
c) Pendapatan Kelautan dan Perikanan	1.856,7	2.472,1	6.630%	4.980%
d) Pendapatan Panas Bumi	2.580,1	2.564,9	4.771%	4.799%
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	56.400,0	2.104,0	218%	5.851%
c. PNBP Lainnya	123.319,4	113.962,4	100%	108%
d. Pendapatan BLU	115.379,5	117.928,4	107%	104%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan RAPBN 2027 (LKPP 2022–2025, Outlook 2026, RAPBN 2027), Tabel 3 Pendapatan Negara.

3 Rekomendasi

1

Mendesak Pemerintah segera melakukan penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026. Jangan ulangi kesalahan bencana di Sumatera dan Flores dimana kapasitas pemerintah daerah jelas sangat terbatas ditengah sentralisasi fiskal.

2

Segera bangun tempat pengungsian yang aman termasuk melakukan evakuasi medis bagi kelompok rentan. Keselamatan rakyat adalah prioritas yang utama.

3

Evaluasi seluruh izin usaha perkebunan termasuk PSN dan pertambangan. Lakukan audit secara menyeluruh dan sanksi pencabutan izin. Hasil audit harus dibuka ke publik sehingga publik bisa ikut mengawasi.

4

Bentuk tim pemulihan ekosistem. Setelah pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024, upaya pemulihan paska Karhutla belum berjalan optimal. Perlu memastikan tim pemulihan ekosistem terintegrasi dengan proses evaluasi dan pencabutan izin usaha pihak penyebab Karhutla.

Referensi

- Ahmed, S., Sami, A., Xueyu, C., Rakib, N. H., Ferdous, S. B., & Mohit, S. (2015). The cost of acute respiratory infections in Northern India: A multi-site study. *BMC Public Health*, 15, Article 330.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. (2026). *Situation report karhutla 2026*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan [BKPK] Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam angka*. Kemenkes RI.
- BPJS Kesehatan. (2024, 15 Juli). *Pernyataan resmi terkait biaya pengobatan penyakit pernapasan*. <https://nasional.kontan.co.id>
- detikHealth. (2026, 23 Agustus). *Kemenkes: Lebih dari 3 juta warga RI kena asap karhutla, kasus ISPA melonjak 78 persen*. <https://health.detik.com>
- Glauber, A. J., Moyer, S., Adriani, M., & Gunawan, I. (2016). *The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis*. World Bank Group. <https://hdl.handle.net/10986/23840>
- Kiely, L., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Papargyropoulou, E., Conibear, L., Wiedinmyer, C., Knote, C., & Adrianto, H. A. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. *Nature Communications*, 12, Article 7044. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27353-x>
- Kontan.co.id. (2024, 15 Juli). *Pengobatan akibat polusi udara, biaya pengobatan menembus puluhan triliun rupiah*. <https://nasional.kontan.co.id>
- World Health Organization Southeast Asia & Fang, D., Xu, J., & Ye, Q. (2020). The impacts of air pollution on health and economy in Southeast Asia. *Energies*, 13(7), Article 1812. <https://doi.org/10.3390/en13071812>

Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan

**Valuasi Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan Indonesia
Januari sd Agustus 2026**

Oleh
Nailul Huda; Bhima Yudhistira Adhinegara

© 2026 CELIOS
CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak.
Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id